

MODEL IMPLEMENTASI SILA KE 4 “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN” SEBAGAI LOKUS PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SMP KOTA SEMARANG

Suyahmo

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

***Abstract.** The purpose of this study was 1) the exploration Application Democracy Education in Junior Semarang; 2) What Weakness and Strength Application Democracy Education; 3) How to model Sila Implementation 4 as the locus of Democratic Education in Junior Semarang. The research method research approach and development (research and development). Location of the study will be selected from junior high schools that have implemented Democracy Education in Semarang. This research subject in addition to students, junior high school teacher in the city of Semarang. The results showed that (1) Implementation of democratic education in schools is carried out using a simulated election dominant class president and student council president directly. These conditions resulted in the student will understand that it is democratic. (2) In a democratic learning a lot of teachers who use the method of discussion, the conditions will be created to make students' perception that the discussion is a method for developing a democratic character. (3) Many students found that dominant, apathetic, normal. Dominant conditions are not controlled by the teacher. (4) The Council is the original form of discussion Indonesia with special characteristics not shared by ordinary discussion.*

***Keywords:** Model Implementation, Sila Fourth, Locus Education, democracy*

PENDAHULUAN

Sukarno menyatakan “...janganlah demokrasi yang kita jalankan itu demokrasi jiplakan entah dari Eropa Barat, entah dari Amerika Serikat, entah dari negara lain. Bahkan saya dalam waktu akhir-akhir ini menegaskan Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi terpimpin (Depren/ 67: Pancasila Sebagai Dasar Negara, 1954). Diluar konteks apakah kita setuju dengan konsepsi demokrasi terpimpinnya Su-

karno atau tidak. Kutipan pidato Sukarno ini menyatakan bahwa suatu bangsa memerlukan konsepsi politik yang sesuai dengan jati diri bangsanya. Ibnu Khladun (Noor. 1998: 123) menyatakan bahwa kekuasaan digunakan untuk mengekang nafsu kebinatangan manusia, sehingga nafsu tersebut tidak merajalela. Kekuasaan (*mulk*) meskipun salah satunya berfungsi untuk mengekang nafsu kebinatangan manusia, juga diharapkan agar dapat mendatangkan kebahagiaan kepada umat manusia,

tetapi kekuasaan juga seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi mengatur, tetapi di sisi lainnya pasti akan diikuti oleh sifat merusak yakni keinginan hidup mewah dan mencari kenikmatan di dunia.

Pencarian format politik tidak akan datang begitu saja. Pencarian format politik suatu negara dapat terkendala masalah sosial politik. Ada negara yang telah menemukan format politiknya, tetapi penemuan format tersebut harus di dahului dengan konflik atau perang saudara seperti yang terjadi di Amerika Serikat. USA pernah mengalami perang saudara antara bagian negara yang setuju perbudakan karena basis daerahnya adalah agraris dengan bagian yang tidak setuju perbudakan karena basis daerahnya industrialis. Konstitusi Amerika Serikat menyatakan anti budak, tetapi ada sebagian wilayah yang tetap menginginkan perbudakan. Kondisi ini menjadikan perang saudara antara pemerintah pusat dengan beberapa negara bagian yang memberontak. Akhir dari pertikaian dimenangkan oleh pemerintah pusat, tetapi menghasilkan pengertian agar negara bagian juga diperhatikan kepentingannya.

Demikian pula dengan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, format politik Indonesia selalu berganti. Dari Parlemerter ke Presidensial dengan bentuk yang berubah-ubah dan skenario politik yang berubah. Misalnya Orde Baru memiliki adigium “Ekonomi sebagai panglima”, maka kepentingan politik agar terkontrol seperti Penederhanaan partai politik, konsepsi *floating mass* (masa mengambang), kemenangan Partai Politik yang didukung pemerintah. Pada masa ini yang terpenting adalah Pembangunan Ekonomi. Berbeda dengan Orde Baru, Orde Reformasi menegaskan konsepsi Politik Orde Baru. Adigium yang digunakan “Kebebasan Politik dan HAM”. Maka era Orde Reformasi penuh dengan intrik-intrik permainan politik, bahkan ada yang menyebutnya seolah-olah seperti masa parlementer 1955-1960 an

yang penuh nuansa kepentingan individu dan golongan. Inilah yang merisaukan kita, demokrasi Indonesia era sekarang berkembang kearah demokrasi yang “individualis dan mementingkan golongan, serta berkompetisi menang kalah”. Yang menang akan memiliki akses untuk menggunakan kekuatan ekonomi negara bagi kepentingannya.

Karena itu perlu dikemukakan bahwa demokrasi yang dikembangkan harus sesuai dengan pengamalan Sila ke 4 dari Pancasila. Tanpa kemauan untuk pengimplementasian sila 4 dalam pendidikan demokrasi di Indonesia, maka siswa akan memahami demokrasi seperti yang dianut negara Eropa Barat atau Amerika Serikat, bahwa demokrasi adalah kebebasan politik, kebebasan berkompetisi, kebebasan berpendapat dan tahapan implementasinya adalah pemilihan ketua OSIS dengan berdebat dan berkampanye. Coba perhatikan praktik Pendidikan Demokrasi seperti ini mengajak siswa belajar zero sum game, biarkan diri saya yang hidup atau saya yang akan mati. Kondisi tersebut menjadikan mereka tidak memiliki pemahaman terhadap ciri kerakyatan, dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan. Penanaman Pendidikan Karakter harus berbasis pada kebudayaan dari murid, karena kebudayaan mempengaruhi tempo penerimaan (Mischel. 1971; Cremer. 1995). Demikian pula dengan White (1978) kebudayaan akan mempengaruhi cepat lambatnya pencapaian tahap-tahap perkembangan moral dan juga mempengaruhi batas tahap perkembangan yang dicapai.

Kondisi tersebut menjadikan perlu adanya model Pengimplementasian Sila Ke 4 sebagai lokus pendidikan demokrasi di Sekolah. Kegiatan ini lebih ke Sekolah karena ketika seorang siswa keliru dalam memahami arti Demokrasi maka ketika dewasa dia akan keliru dalam implementasinya. Model ini tentu saja memiliki harapan agar demokrasi yang dikembangkan di Indonesia menjadi demokrasi deliberative, bukan demokrasi libera-

lis yang kapitalis atau demokrasi bentuk lain yang tirani.

Manusia dalam teori Kewarganegaraan (citizenship), seperti yang dikemukakan Marshall memiliki beberapa hak, antara lain: 1) Hak Sipil meliputi kebebasan dalam berpendapat, bergagasan dan berkeyakinan dan berhak atas properti, kontrak dan keadilan, 2) Hak Politik meliputi hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan dan pemilihan publik, 3) Hak sosial meliputi hak untuk keamanan dan kesejahteraan guna berbagi dalam warisan sosial dan untuk hidup dalam kehidupan yang lebih maju sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat (Kalidjernih. 2011: 5). Ketiga hak tersebut merupakan sesuatu yang secara minimalis harus dipunyai oleh setiap Warga Negara.

Easton (1963: 3) menyatakan bahwa Sistem Politik akan dapat berjalan baik serta menghasilkan output yang baik bila mendapat dukungan (supporting system) serta mendapatkan tentangan (oposan system). Dukungan dan tentangan harus ada agar sistem politik dapat berjalan dengan seimbang. Keseimbangan antara tentangan dan dukungan baru dapat berjalan bila tidak ada pemutlakan dan penghilangan kebenaran. Peter (2007: 374) menyatakan "Political egalitarianism is at the core of most normative conceptions of democratic legitimacy. It finds its minimal expression in the "one person one vote" formula".

Mulyasa (2001) dalam Dra. Sri Wuryan (2008: 94-95) mengemukakan sebab-sebab terjadinya degradasi nilai-nilai demokrasi, yaitu:

- a) Adanya kelompok yang menjadikan demokrasi sebagai komoditi yaitu menghalalkan berbagai cara dalam perilakunya dengan kedok demokrasi.
- b) Banyaknya pemikir yang berperan sebagai pekerja demokrasi.
- c) Pembangunan demokrasi terjebak pada pembicaraan hubungan antara konsep dan nilai.

- d) Pemikir politik dan demokrasi banyak yang dibangun secara spekulatif tanpa merujuk pada hasil riset.
- e) Konsep demokrasi tidak ditopang oleh supremasi hukum dan aspirasi riil.
- f) Tuntutan penegakan demokrasi tidak diikuti oleh perubahan sikap yang menekankan pada kesadaran hukum, tanggung jawab, profesionalisme, disiplin dan kerjasama

Problematika dari Sistem Politik Indonesia adalah selalu dibentuk dalam kondisi darurat, serta bersifat *incremental*, sehingga format politik yang cocok bagi Bangsa Indonesia selalu mencari bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, selalu di dahului kondisi gejolak. Orde Sukarno, dimulai dari gejolak kemerdekaan yakni menghilangkan otoritas penjajah, memasuki otoritas ke Indonesiaan. Meskipun dalam bidang Politik untuk menghindari isu fasisme, Bung Hatta mengeluarkan maklumat No X (eks) yang isinya memperbolehkan segenap bangsa Indonesia untuk membentuk Partai politik. Maka munculah berbagai Partai Politik yang memiliki ciri ideologi yang beragam.

Dalam negara demokrasi yang baru, telah muncul fokus agar pendidikan dapat memberikan kontribusi guna pembentukan warga negara yang demokratis. Sektor pendidikan harus lebih berperan untuk menghilangkan apatis, keengganan berpartisipasi, pengabaian (*ignorance*) dan non sektarian. Sementara di negara-negara demokrasi mapan lebih fokus tentang cara memelihara dan mempertahankan minat dan keterlibatan dalam kemasyarakatan melalui proses dan praktik demokrasi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) melakukan eksplorasi Penerapan Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang; 2) Apa Kelemahan dan Kekuatan Penerapan Pendidikan Demokrasi; 3) Bagaimana model Penerapan Sila 4 sebagai Lokus Pendidikan Demokrasi di SMP Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Demokrasi menjadi materi Bab 2 Kelas VII yang bertema menyemai kesadaran konstitusional, disitu guru biasanya akan memberikan uraian yang bersifat kognitif, apa itu demokrasi, macam-macam demokrasi yang berkembang di dunia ini. Guru juga sudah berceramah bahwa praktik demokrasi dilakukan dengan musyawarah mufakat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah guru belum dapat menunjukkan bagaimana cara bermusyawarah yang baik. Hal ini juga disebabkan masih minimnya model atau contoh bagaimana musyawarah itu. Dalam penelitian ini guru hanya menyatakan musyawarah itu seperti diskusi.

Praktik diskusi biasanya dilakukan dengan mengelompok-kelompokan siswa dalam jumlah antara 8 s. d. 10 orang. Satu kelompok biasanya duduk melingkar, dalam kelompok itu biasanya ditunjuk pimpinan kelompok serta notulen yang akan mencatat setiap usulan atau pernyataan dari anggota kelompok. Anggota kelompok tersebut ada yang pasif tetapi ada yang aktif, ada yang dominan bahkan cenderung mendominasi tetapi adapula kurang partisipatif. Biasanya hasil kelompok ini yang kemudian akan didiskusikan secara pleno di kelas. Kondisi ini menjadikan apa yang terjadi dengan per anggota kurang begitu terpantau. Apalagi kalau gurunya hanya satu orang saja. Dalam suatu kelompok diskusi; mungkin akan muncul anak yang ingin mendominasi pendapat orang lain. Akan muncul anak yang memaksakan kehendaknya agar semua anggota menuruti apa yang diusulkannya, demikian pula sebaliknya akan muncul anak yang terlalu apatis tidak mau berpendapat, cenderung tidak urusan dengan apa yang akan didiskusikan. Anak akan terkategori menjadi empat dalam diskusi yang biasa dilakukan di kelas yakni:

- 1) Demokratis
- 2) Dominan
- 3) Normal (sedang/ biasa)
- 4) Apatis.

Muncul suatu problem, apakah anak yang dominan diperbolehkan dalam diskusi? yang tidak diperbolehkan adalah anak yang mendominasi (melakukan dominasi) terhadap pendapat siswa lainnya. Dia memaksakan kehendaknya agar diikuti oleh pihak lainnya. Dengan demikian metode diskusi kalau kita tidak hati-hati akan melahirkan orang yang tidak demokratis (ademokratis). Disamping itu juga dapat pula melahirkan orang yang apatis yakni orang yang tidak peduli dengan pendapat orang lain. Metode Diskusi harus diarahkan agar siswa masuk dalam kategori normal yakni dapat menerima pendapat orang lain, mampu bertoleransi serta mampu mengemukakan pendapat secara baik, santun dan jelas. Sehingga metode diskusi tidak sekedar dijadikan ajang untuk latihan bicara atau mengemukakan pendapat saja. Guru harus menyusun sintaks pembelajaran yang dapat mengawasi aktifitas setiap siswa.

Pelaksanaan pendidikan demokrasi harus pula didukung dengan penerapan pendidikan demokrasi. Penerapan pendidikan demokrasi berarti, praktik pendidikan harus dalam nuansa demokratis. Seringkali kita saksikan bahwa praktik pendidikan tidak mencerminkan nuansa yang demokratis, yakni membiarkan orang yang apatis menjadi apatis serta membiarkan orang yang cenderung mendominasi orang lain menjadi tetap dominan. Kondisi ini berarti kita akan melahirkan orang yang *tyran* dan orang yang tidak berpartisipasi. Ada sekolah yang selalu menjadi ketua kelas adalah siswa itu saja. Memang siswa yang dominan memiliki kompetensi serta keterampilan yang lebih dibandingkan siswa lainnya. Kondisi ini menjadikan guru harus melakukan pembinaan yang tepat terhadap kategori siswa seperti ini, mereka memiliki talenta untuk memimpin tetapi harus disadarkan bahwa ada pendapat

orang lain, ada sudut pandang orang lain (SPOL) , bukan hanya sudut pandang dirinya sendiri (SPDS).

Bagaimana dengan anak yang memiliki kecenderungan apatis? Anak yang memiliki kecenderungan apatis biasanya memiliki berbagai permasalahan dalam memandang metode diskusi seperti; 1) memandang bahwa diskusi tidak ada gunanya, hanya menghabiskan waktu saja, 2) memiliki masalah dalam komunikasi seperti tidak terbiasa untuk berbicara di depan umum, cara komunikasinya belum bagus, 3) memiliki rasa malu yang berlebih untuk berpendapat di depan umum. Guru juga harus memperhatikan kategori ini, karena kalau dibiarkan, dia akan menjadi manusia yang masa bodo dengan sekitarnya. Demikian pula dengan siswa kategori normal, siswa ini dapat tertarik menjadi dominan, atau dapat pula tertarik menjadi apatis. Dengan demikian guru harus mengarahkan anak menjadi orang yang demokratis. Karakter Demokratis memiliki ciri menurut John Dewey dalam Zamroni (2007: 50) bahwa nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak mengutamakan diri sendiri pada orang lain dan taat pada peraturan yang berlaku. Dengan demikian karakter demokratis itu menyeimbangkan antara SPOL (Sudut Pandang orang lain) dengan SPDS (sudut pandang dirinya sendiri) ditambah dengan cara penyampaian yang tidak menyinggung orang lain. Metode diskusi harus dikembangkan lebih lanjut, karena diskusi merupakan metode yang netral. Inilah fungsinya guru, bila gurunya tidak memahami apa esensi karakter demokrasi maka siswa yang dominan akan berkembang menjadi siswa yang egois dan mau menang sendiri, siswa dapat tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, bahkan

siswa berpikir bahwa lingkungan yang harus sependapat dengan siswa tersebut.

Pendidikan demokrasi harus mengkait dengan cara pandang siswa dalam berinteraksi dengan sesamanya, tetapi juga harus mengkait dengan strukturalis atau aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan demokratis dalam pemerintahan. Dalam penelitian untuk mengenalkan pemerintahan yang demokratis, siswa dikenalkan dengan pemilihan ketua kelas serta pemilihan ketua OSIS secara langsung.

Berkaitan dengan pemilihan ketua OSIS, dijumpai ada yang menggunakan sistem pemilihan langsung yakni semua siswa memiliki kesempatan untuk memilih ketua OSIS yang diinginkan, tetapi adapula pemilihan sistem perwakilan yakni yang memiliki hak suara adalah ketua kelas, wakil ketua kelas serta ketua dan wakil ketua pengurus kegiatan siswa seperti Racana Pramuka, Atletik, PMR, PKS dan sebagainya. Perwakilan ini yang akan menentukan ketua OSIS kedepan. Sekolah kadang menyederhanakan bahwa pendidikan demokrasi sekadar memilih ketua OSIS atau ketua kelas secara langsung. Kandidat biasanya ditentukan dengan menentukan kriteria siswa yang dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua.

Siswa yang memiliki nilai rata-rata Rapor delapan yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Siswa yang sesuai kriteria diberi kesempatan untuk melakukan kampanye terbuka di aula sekolah atau lapangan sekolah. Pada hari pemilihan semua siswa sekolah tersebut akan dipersilahkan oleh guru menuju tempat pemilihan.

Tempat kampanye biasanya dilakukan di aula atau halaman sekolah. Kampanye dilakukan dengan memberi kesempatan kandidat untuk berpidato di depan seluruh siswa.

Kandidat akan menyampaikan beberapa pemikirannya dengan waktu yang ditentukan. Teman-temannya akan bersorak memberi semangat, atau mentertawakan apa yang dilakukan oleh kandidat. Tahapan kampanye kandi-

dat dianggap sebagai penyampaian Visi Misi seorang calon ketua OSIS. Setelah penyampaian pemikiran tersebut, siswa akan diberi kesempatan untuk memilih kandidat sesuai pilihannya.

Dalam praktik Pemilihan Ketua OSIS, pelaksanaannya seperti melakukan simulasi Pemilihan Umum secara langsung. Siswa langsung melakukan pencoblosan untuk menentukan pilihan sesuai seleranya. Siswa seolah-olah dibawa untuk merasakan suasana PEMILU.

Sarana Prasarana dalam Pendidikan Demokrasi

Dalam pendidikan demokrasi kita memahami bahwa siswa memiliki bawaan sebelum belajar, bawaan siswa ini akan mempengaruhi daya serap siswa terhadap stimulus yang diberikan. Siswa dengan bawaan A ketika menerima stimulus B, dengan siswa dengan bawaan B ketika menerima stimulus B maka hasil yang didapatkan akan berbeda. Siswa dengan bawaan yang berbeda akan menerima stimulus yang sama, maka hasil yang didapatkannya akan berbeda pula. Demikian juga guru, guru juga memiliki bawaan tertentu sebelum dia mengajarkan sesuatu. Bawaan guru akan menjadi stimulus bagi siswa. Disamping bawaan guru dan siswa, Pendidikan Demokrasi kadang juga dimasukkan di dalam kurikulum, sehingga pelaksanaan Pendidikan Demokrasi akan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan kurikulum. Disamping dari kurikulum juga akan terpengaruh oleh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini akan memberikan iklim demokrasi di Sekolah. Sekolah yang memiliki lingkungan dengan nuansa demokratis yang baik, akan mendorong siswa untuk berperilaku demokratis.

Dalam penelitian ini dijumpai ada sekolah yang memasang kotak saran agar siswa yang akan memberi pendapat tentang sesuatu dapat disalurkan dengan mudah. Saran dari

siswa biasanya akan ditindaklanjuti kalau dirasa dapat dilakukan, tetapi kalau memerlukan pemikiran lebih lanjut maka saran tersebut akan di rekapitulasi dulu, setelah itu akan diagendakan dalam rapat guru. Kotak saran biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis seperti di samping pintu kelas, dekat kantin, dekat ruang guru, UKS dan perpustakaan.

Kotak saran adalah upaya dari pihak sekolah untuk mendapatkan input dari *stakeholders* terutama siswa tentang berbagai hal yang terkait dengan segala permasalahan sekolah yang mungkin timbul. Input kemudian akan memasuki tahapan proses yang dilakukan dengan rekapitulasi saran yang terkumpul, membicarakan saran dalam suatu rapat, kemudian memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan saran.

Belum semua sekolah menyadari pentingnya keberadaan kotak saran, bahkan siswa tidak dilatih secara khusus untuk menyampaikan sesuatu secara tertulis dengan menggunakan kotak saran. Sejuahmana kemampuan siswa dapat menyampaikan pendapatnya baik secara tertulis maupun lisan merupakan salah satu keterampilan demokratis harus dimiliki siswa. Siswa dapat menuliskan hal-hal yang dianggap kurang atau menyampaikan saran-saran perbaikan dalam suatu susunan kata yang tidak menyinggung berbagai pihak.

Peningkatan keterampilan demokratis individu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Keterampilan berbicara dengan orang lain dalam rangka menyampaikan suatu pendapat sudah dilakukan di berbagai sekolah. Siswa dilatih untuk menyampaikan pendapatnya dalam suatu diskusi, tetapi keterbatasan materi masih dirasakan siswa, hal ini disebabkan keterbatasan dari pustaka yang dimiliki siswa. Siswa kadang merasa kurang percaya diri ketika menyampaikan suatu pendapat disebabkan siswa belum yakin secara utuh memahami materi yang didiskusikan tersebut.

Keterbatasan pustaka dapat diminimalisir dengan pengayaan siswa terhadap sumber

belajar yang menggunakan internet secara online. Tetapi kondisi tersebut terkendala oleh kemampuan sekolah untuk pengadaan sarana internet yang memadai. Sekolah yang mampu melakukan pengadaan akses poin internet secara memadai, akan menjadikan siswa mampu mencari berbagai sumber terkait materi yang didiskusikan dari internet online. Kemampuan sekolah untuk menyelenggarakan sarana prasarana yang lebih terkendala dengan dihapuskannya sekolah untuk mendayagunakan bantuan orang tua siswa. Akibatnya pendayagunaan dana sangat tergantung dengan anggaran dari negara, akibatnya sekolah-sekolah tertentu tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana secara prima.

Perpustakaan Sekolah juga belum banyak mengkoleksi buku-buku tentang pengembangan karakter demokratis. Buku-buku yang dikoleksi masih bernuansa kognitif, berisi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Penguasaan terhadap “*how do life together*” masih kurang. Buku-buku karakter masih tersirat dalam buku-buku sastra, masih jarang buku yang membahas bagaimana agar kita dapat tenggang rasa dengan orang lain.

Demikian pula dengan keberadaan laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, hampir seluruh sekolah yang diteliti tidak memiliki laboratorium PPKn. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa PPKn akan lebih cenderung dihapalkan dibandingkan dijadikan sebagai pengembang karakter. Laboratorium PPKn di dalam *civic education* international berfungsi sebagai *civic engagement*, yakni mata pelajaran *pegungkit*, yang akan melejitkan karakter siswa dengan melakukan beberapa kegiatan baik skala sekolah maupun skala nasional. Misalnya di dalam skala sekolah diadakan peningkatan keterampilan siswa dalam mengusulkan sesuatu ketimpangan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Civic engagement ini kemudian dijadikan *event* yang dilakukan dewan civic wilayah

dalam bentuk lomba yang akan diikuti oleh seluruh siswa yang mengambil mata pelajaran *civic*. Lomba ini tidak sekadar mencari siapa yang menang dan menjadi juara, lomba ini merupakan simulasi pelaksanaan demokratis sehingga siswa akan memiliki pemahaman untuk menjumbuhkan antara teori dan praktik.

Model Implementasi Sila Ke 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Pelaksanaan “SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN” memiliki nilai antara; 1) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, 2) Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, 5) Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, 7) Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut diatas merupakan versi Eka Prasetya Pancasila, tafsir Pancasila yang sering didengarkan masa orde baru.

Kalau kita nalisis pengamalan sila Pancasila nilai-nilai diatas maka ada beberapa nilai inti; 1) mementingkan kepentingan negara dan masyarakat, 2) adanya musyawarah sebagai pengambilan keputusan bersama dengan mufakat dengan kekeluargaan, itikad baik, rasa tanggungjawab menerima keputusan, melaksanakan hasil, akal sehat, hati nurani luhur, keputusan dapat dipertanggungjawab-

kan dihadapan Tuhan YME, Harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian dalam mengembangkan karakter demokratis yang utama adalah mengajarkan siswa untuk melakukan musyawarah.

Apakah musyawarah berbeda dengan diskusi ? Diskusi merupakan istilah yang netral, dalam diskusi orang dapat mencapai siapa yang menang dan siapa yang kalah, dalam diskusi orang tidak memperdulikan siapa yang dominan. Dalam diskusi kadang orang berpikir secara tim, agar apa yang akan diusulkan dapat diterima oleh seluruh peserta. Sedangkan musyawarah merupakan konsep diskusi yang asli Indonesia, dalam musyawarah yang dipikirkan adalah mencapai keputusan yang dianggap paling utama berdasarkan hati nurani, pertimbangan akal sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan demikian pengembangan keterampilan demokrasi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan: meningkatkan kemampuan musyawarah diantara siswa. Untuk mempraktikkan musyawarah maka siswa harus diberi pengertian dulu apa itu musyawarah. Sehingga langkah pertama adalah menyadarkan siswa tentang keunggulan musyawarah. Apa itu musyawarah? Bagaimana cara melakukan musyawarah?

Model peningkatan musyawarah yang ditawarkan adalah sebagai berikut: 1) Guru memberi pengertian dulu, apa itu musyawarah. 2) Guru menyiapkan materi yang akan dimusyawarahkan. 3) Kelas dibagi menjadi lima kelompok besar, yang masing-masing terdiri dari 5 sampai dengan 7 anak. 4) Guru mempersilahkan siswa untuk membahas bahan musyawarah. 5) Guru mempersilahkan salah satu siswa untuk memaparkan hasil musyawarah kelompok. 6) Siswa diajak untuk mencari yang terbaik dari setiap pendapat. 7)

Siswa dilatih sensitifitasnya terhadap emosi dirinya serta emosi kelompoknya. 8) Siswa diajak untuk menganalisis berbagai pendapat dari Sudut Pandang Diri Sendiri (SPDS) serta dari Sudut Pandang Orang Lain (SPOL). 9) Siswa kemudian mengemukakan pendapatnya. 10) Siswa mengambil kesimpulan.

Disamping pengembangan kemampuan sensitifitas diri siswa; siswa diajak untuk merasakan berbagai pendapat orang lain, demikian pula dengan pendapatnya. Sensitifitas ini untuk meminimalisir timbulnya dominasi diantara sesama. Ketika seseorang merasa terlalu dominan, maka hendaknya dia segera menyadari sejauhmana dominasinya, kemudian berusaha untuk mengurangnya. Demikian juga dengan siswa lainnya, sehingga dengan berlatih sensitivitas ini maka siswa berlatih untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ketika semua orang berlatih untuk mengendalikan dirinya maka akan timbul kemampuan tenggang rasa.

Pengembangan kemampuan demokratis lainnya adalah pengembangan kemampuan retorika. Siswa harus dididik agar mampu menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan. Siswa diajarkan menuliskan pendapat-pendapat, permasalahan-permasalahan di sekitar. Kemampuan ini diasah dengan mengembangkan *citizen project*.

Disamping pengembangan retorika serta *citizen project* maka juga dilakukan dengan simulasi berbagai kegiatan yang relevan dengan kegiatan demokrasi seperti simulasi pemilihan umum, simulasi kampanye, simulasi sidang parlemen, simulasi membuat rancangan Undang-Undang dan sebagainya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan antara

lain. (1) Pelaksanaan Pendidikan demokrasi di sekolah lebih dominan dilakukan menggunakan simulasi pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS secara langsung. Kondisi ini mengakibatkan siswa akan memahami bahwa demokratis itu. (2) Dalam pembelajaran demokrasi guru banyak yang menggunakan metode diskusi, kondisi menjadikan persepsi siswa akan terbentuk bahwa diskusi merupakan metode untuk mengembangkan karakter demokratis. (3) Banyak ditemukan siswa yang dominan, apatis, normal. Kondisi yang dominan tidak dikendalikan oleh guru. (4) Musyawarah merupakan bentuk diskusi yang asli Indonesia dengan ciri yang khusus yang tidak dimiliki oleh diskusi biasa.

DAFTAR PUSTKA

- Kalidjernih, Freddy K. 2011. *Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan*. Edisi 3. Widya Aksara Press. Bandung.
- Ramage, Douglas E. 2005. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. Routledge. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE
- Biesta, Gert J. J. 2010. *Learning Democracy in School and Society*. Sense Publishers, P.O. Box 21858, 3001 AW Rotterdam.
- Peter, Fabienne . 2007. *The Political Egalitarian's Dilemma*. Journal Ethic Theory Moral Prac V 10. Springer Science. Halaman : 373–387
- Izzo, Valerio Nitrato . 2012. *Beyond Consensus: Law, Disagreement and Democracy* Int J Semiot Law V 25. Springer Science. Hal: 563–575
- Saksono, Ign Gatut. *Pancasila-Soekarno*. CV Urna Cipta Media Jaya. Yogyakarta.
- Wuryan, Sri. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan (civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- R. J. G. Claassen. 2009. *New Directions for the Capability Approach: Deliberative Democracy and Republicanism*. Res Publica :421–428